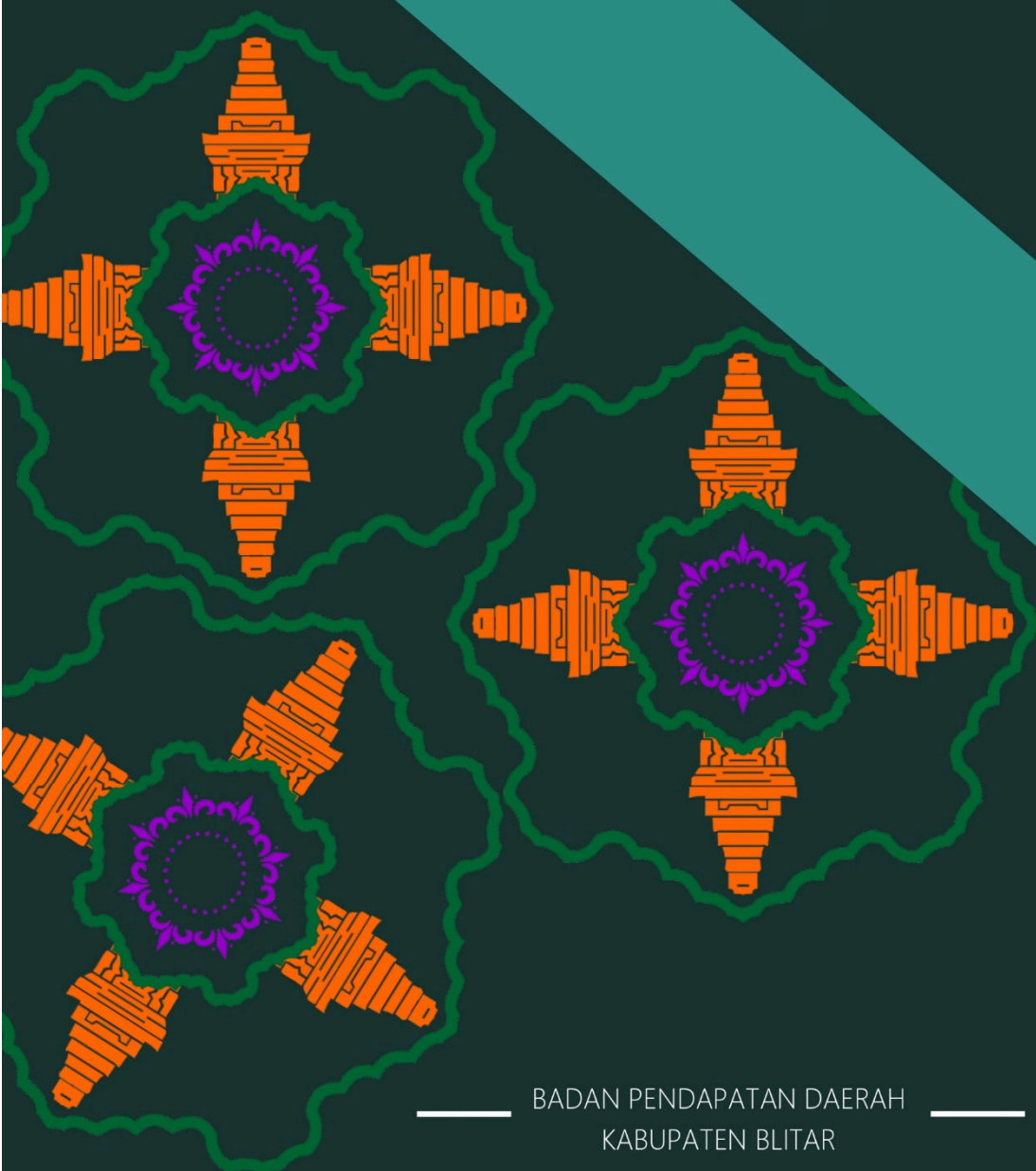


Bapenda
juara



RENJA 2025




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2025.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar, yakni “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur“. Dengan demikian, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Blitar, Agustus 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

ASMANINGAYU DEWI L., ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780426 200212 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ..	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	29
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	40
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam prosesnya, penyusunan rencana kerja merupakan penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana kerja tahunan adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar perlu Menyusun Rencana Kerja Tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2021 – 2026.

Proses penyusunan Rencana Kerja dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan akhir RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan rancangan akhir RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
2. Sebagai acuan dalam rangka penyusunan RKA-DPA Tahun 2025

Tujuan

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya, perkiraan pencapaian tahun berjalan, dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan R-APBD 2025 agar dapat terlaksana serta bermanfaat dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.
3. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelayanan Publik baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar perlu memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional serta berkualitas.

Untuk mengetahui capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah maka perlu dikaji capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.298.645.588,00	6.943.031.164,00	95,13
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.398.307.778,00	9.233.299.224,00	98,24
TOTAL		16.696.953.366,00	16.176.330.388,00	96,88

Capaian Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebesar 96,88% atau sebesar 16.176.330.388,00 dari total pagu anggaran sebesar 16.696.953.366,00. Jika dilihat dari target belanja yang seharusnya dikeluarkan hasilnya tidak sampai 100%, dan akan dikatakan tidak tercapai secara kinerja belanja. Namun jika kita kembali kepada prinsip-prinsip ekonomi bahwa bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan jumlah anggaran belanja yang dikeluarkan hanya sedikit. Dan menurut kami secara prinsip dengan belanja yang efektif dan efisien namun target tercapai merupakan sebuah pencapaian yang baik.

Hal tersebut dapat kita lihat dari capaian pajak daerah pada tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2023

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	202.380.654,00	244.773.888,00	120,95
2	PAJAK RESTO	4.000.000.000,00	5.231.355.269,47	130,78
3	PAJAK HIBURAN	2.035.610.232,00	2.128.845.020,00	104,58
4	PAJAK REKLAME	684.585.736,50	693.237.750,50	101,26
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	49.500.000.000,00	50.517.705.691,00	102,06
6	PAJAK PARKIR	200.000.000,00	279.342.892,00	139,67
7	PAJAK AIR TANAH	220.681.558,50	293.961.746,40	133,21
8	PAJAK MBLB	597.349.796,00	655.433.013,00	109,72
9	PBB	45.000.000.000,00	41.256.751.026,39	91,68
10	BPHTB	25.351.449.137,00	27.353.904.426,00	107,90
	PAJAK DAERAH	127.792.057.114,00	128.655.310.722,76	100,68

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan semua jenis pajak dapat tercapai targetnya dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, dan jika kita sandingkan dengan anggaran belanja yang tidak 100% namun dengan target pajak yang tercapai secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa belanja yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berjalan efektif dan efisien.

Dengan 2 capaian target belanja dan target pajak daerah di atas, maka kita akan masuk kedalam capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah	4,77%	5,11%	7,13%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa target IKU untuk 2023 semuanya terpenuhi dan sesuai harapan namun masih ada beberapa hal masih perlu ditingkatkan dalam implementasinya, karena walaupun secara keseluruhan semua target dapat tercapai namun semua tetap harus meminimalisir hal-hal yang dapat mempengaruhi Penerimaan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah.

Capaian Kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah disusun dalam perumusan Rencana Strategis Organisasi. Bapenda Kabupaten Blitar sendiri memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 2 (dua) program dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Tingkat capaian kinerja setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar terbagi ke dalam 2 (dua) program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 26 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang mana target, realisasi, dan capaian indikator kinerja outpunya sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/output yang direncanakan ;

Adapun program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renja yang direncanakan dan faktor penyebab serta upaya untuk mengatasi faktor penyebab adalah :

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen.

- b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 22 kecamatan dari target sebanyak 22 kecamatan.

- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 Jenis dari target 2 Jenis.
 - d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 Objek Pajak dari target 2 Objek Pajak.
 - e) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 10 Jenis dari target 10 Jenis Data Pajak yang dilakukan pengolahan dan pemeliharaan.
 - f) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 5 Objek Pajak dari target 5 Objek Pajak yang dilakukan penilaian.
 - g) Penetapan Wajib Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 795.711 Wajib Pajak dari target sebanyak 795.711 Wajib Pajak dengan jumlah surat ketetapan pajak daerah.
 - h) Penagihan Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 795.711WP dari target sebanyak 795.711 Wajib Pajak yang tertagih.
 - i) Pengendalian, Pemeriksaan, Pengawasan Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 50 rekomendasi dengan target sebanyak 100 rekomendasi yang dikeluarkan sehingga masih tercapai 50%. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dan pengawasan yang masih dalam proses.
 - j) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 4 Kali dengan target sebanyak 4 kali koordinasi yang dilakukan.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 105%, terealisasi sebanyak 39 Orang dari target sebanyak 37 Orang ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan. Hal ini dikarenakan terdapat ASN yang mutasi maupun pensiun serta terdapat tambahan CPNS baru.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 105%, terealisasi sebanyak 39 Orang dari target sebanyak 38 Orang ASN. Hal ini dikarenakan terdapat ASN yang mutasi maupun pensiun serta terdapat tambahan CPNS baru.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 5 Jenis dari target sebanyak 5 Jenis. Hal ini dikarenakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah dilaksanakan sesuai rencana sehingga operasional kantor berjalan dengan baik.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 12 Jenis dari target sebanyak 12 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 Jenis dari target sebanyak 2 Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 Jenis dari target sebanyak 2 Jenis Bahan Logistik kantor yang disediakan.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 5 Jenis dari target sebanyak 5 Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 4 eksemplar dari target sebanyak 4 eksemplar bahan bacaan yang disediakan.

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 4 kali dari target sebanyak 8 kali koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan sehingga masih tercapai sebesar 50%. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut belum cukup sering mengundang wajib pajak untuk pemeriksaan maupun klarifikasi.
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 Unit dari target sebanyak 2 Unit peralatan rumah tangga yang disediakan.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 100%, terealisasi sebanyak 12 laporan dari target sebanyak 12 laporan surat menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase sebesar 100%, terealisasi 2 rekening dari target 2 rekening yang dibayarkan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 100%, terealisasi sebanyak 6 orang dari target sebanyak 6 orang. Hal ini dikarenakan tenaga pelaksana yang dibayar sudah sesuai dengan target seharusnya.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 100%, terealisasi sebanyak 9 unit dari target sebanyak 9 unit kendaraan dinas yang dipelihara.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 100%, terealisasi sebanyak 5 unit dari target sebanyak 5 unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 100%, terealisasi sebanyak 1 gedung dari target sebanyak 1 gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi.

Dan untuk Capaian Kinerja Belanja Badan Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	6.859.831.148,00	3.160.741.254,00	46,08
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.794.635.154,00	1.375.834.458,00	12,75
TOTAL		17.654.466.302,00	4.536.575.712,00	25,70

Capaian Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 25,70% atau sebesar Rp 4.536.575.712,00 dari total Pagu anggaran sebesar Rp 17.654.466.302,00. Jika dilihat dari capaian belanja, masih jauh dari target, hanya memang secara mapping belanja banyak kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada triwulan III dan IV.

Dan berikut adalah realisasi Pajak Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL REALISASI PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	190.545.278,00	85.423.142,00	44,83
2	PAJAK RESTO	4.794.746.293,00	1.860.592.733,13	38,80
3	PAJAK HIBURAN	2.007.049.808,00	987.457.903,00	49,20
4	PAJAK REKLAME	679.200.000,00	225.022.714,00	33,13
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	51.042.826.800,00	27.105.774.580,00	53,10
6	PAJAK PARKIR	197.573.670,00	95.273.808,00	48,22
7	PAJAK AIR TANAH	231.432.800,00	211.304.419,00	91,30
8	PAJAK MBLB	623.773.528,00	216.237.753,00	34,67
9	PBB	46.317.798.087,00	11.501.135.381,00	24,83

10	BPHTB	28.933.592.839,00	7.495.752.185,00	25,91
	PAJAK DAERAH	135.018.539.103,00	49.783.974.621,31	36,87

Capaian penerimaan Pajak Daerah pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 36,87%, dimana indikator pengukuran berasal dari perhitungan target sebesar Rp 135.018.539.103,00 sedangkan realisasi target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sebesar Rp 49.783.974.621,31. Dilihat dari capaian tersebut, target penerimaan pajak daerah masih belum dapat tercapai dikarenakan ada beberapa kendala dan hambatan yang masih dalam proses penyelesaian. Dikatakan tercapai target, jika penerimaan pajak daerah sudah mencapai 40%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kinerja Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra. Hal ini berarti masyarakat puas dengan pelayanan perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, hal ini berbanding lurus dengan pemenuhan target pada Tahun 2023, yang hampir semua jenis pajak. Sedangkan untuk Tahun 2024 pemenuhan target masih terus dilakukan optimalisasi-optimalisasi serta terus melaksanakan strategi-strategi yang sudah direncanakan pada akhir Tahun 2023 agar pada Tahun 2024 ini Target Penerimaan Pajak Daerah dapat terealisasi dengan optimal.

Namun walaupun target tercapai, tetap perlu digaris bawahi bahwa masih banyak potensi-potensi Pajak Daerah yang masih belum tergali dan masih perlu di maksimalkan. Maka dari itu diperlukan alternatif strategi serta inovasi agar pajak yang tercapai target nya pada tahun 2023, untuk tahun 2024 dapat meningkat dan lebih optimal.

Disamping berbicara mengenai potensi, edukasi dan sosialisasi serta kemudahan untuk masyarakat utamanya wajib pajak masih harus tetap dilaksanakan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat adalah sesuatu yang harus terus dan tetap dijalankan untuk dapat terus menambah lagi kesadaran masyarakat perihal Pajak Daerah serta untuk masyarakat utamanya wajib pajak yang sudah mulai menyadari pentingnya membayar pajak adalah harus adanya inovasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan perpajakan.

Maka dari itu, pada Sub Bab ini juga disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024 (Juli)
1.	Pendapatan Daerah	2.742.392.315.496,00	3.000.911.379.359,00	3.008.662.291.206,00	3.026.614.437.422,00	2.515.747.374.072,44	2.416.260.631.602,00
2.	Pajak Daerah	130.802.445.232,00	174.621.264.385,00	175.494.370.707,00	177.249.314.414,00	128.624.500.722,76	63.472.720.614,68
3.	Presentase Pajak Terhadap Total Pendapatan	4,77%	5,82%	5,83%	5,86%	5,11%	2,63%
		Target Real				Realisasi	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024 (Juli)
1.	Pendapatan Daerah	2.480.710.428.126,46	2.416.260.631.602,00	-	-	2.515.747.374.072,44	2.416.260.631.602,00
2.	Pajak Daerah	127.792.057.114,00	135.018.539.103,00	245.920.045.935,00	-	128.624.500.722,76	63.472.720.614,68
3.	Presentase Pajak Terhadap Total Pendapatan	5,15%	5,59%	-	-	5,11%	2,63%

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Pendatan Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 s/d Juli (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Analisis
1	Nilai SAKIP	N/A	-	BB	A	A	A	BB	-	A	A	
2	Presentase Pajak Terhadap Total Pendapatan	N/A	-	4,77	5,82	5,83	5,86	5,11	2,63	5,83	5,86	

Dari 2 tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada perbedaan dalam Renstra dan Renja, karena memang secara real target yang terpasang sesuai dengan hasil kajian potensi yang dilihat dari realisasi tahun sebelumnya dan serta potensi yang ada pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Maka dari itu kami menyampaikan 2 tabel yang berisi target di dalam renstra dan target real yang memang di jalankan. Yang ada perbedaan bukan hanya pada Pajak Daerah saja, tapi secara keseluruhan Pendapatan Daerah. Namun secara target Riil, pada Tahun 2023 2 Indikator Kinerja Utama sudah tercapai, SAKIP yang mendapatkan nilai “BB” dan presentase pajak daerah terhadap total pendapatan yang melampaui target yang telah di tetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatkan profesionalisme petugas juga kualitas sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan maksimal sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada yaitu :

- a. Sistem Pelayanan dan Pembayaran Online yang masih belum maksimal.
- b. Potensi pajak daerah yang masih belum tergali secara maksimal.
- c. Kesadaran dan Kepatuhan masyarakat utamanya wajib pajak dalam membayar pajak
- d. Komunikasi dan Koordinasi yang belum maksimal dengan beberapa OPD penghasil.
- e. Belum Optimalnya penagihan piutang terutama PBB-P2 yaitu ditandai dengan semakin bertambahnya nilai Piutang Pajak Daerah.

Dengan adanya beberapa permasalahan dan hambatan tersebut tentunya akan sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan Bupati. Maka dari itu permasalahan dan hambatan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar visi dan misi dari Bupati dapat berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karenanya Badan Pendapatan Daerah harus melihat Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Layanan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Adapun Tantangan yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah :

- a. Sistem aplikasi dan jaringan yang terkadang masih ada kendala, merupakan salah satu tantangan yang harus segera di tindak lanjuti.
- b. Beberapa potensi daerah yang sebenarnya sudah dapat terpetakan, hanya kesulitannya muncul dari wajib pajak itu sendiri.
- c. Piutang yang semakin meningkat jikat tidak ditindaklanjuti.

Lalu Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang berpotensi menguntungkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dan perangkat daerah lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Peluang dimaksud terdiri dari:

- a. Jumlah Penduduk yang cukup banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi objek pajak.
- b. Letak wilayah yang luas, sehingga masih banyak potensi pajak yang masih dapat digali lebih maksimal lagi.

- c. Kabupaten Blitar mempunyai sumber alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil peternakan, perikanan, hasil tambang, serta pariwisata sejarah yang mempunyai nilai, dan jika di maksimalkan akan menghasilkan PAD yang sangat luar biasa.
- d. Perkembangan Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Adanya Kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik vertical maupun horizontal.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Blitar, maka dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program pemerintah Kabupaten Blitar 2021 – 2026.

Bertolak pada identifikasi permasalahan, visi, misi, serta arah kebijakan kepala daerah, hasil Analisa Renstra, maka beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah :

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi transformasi
- b. Optimalisasi kualitas database potensi pajak daerah
- c. Optimalisasi pelayanan pajak daerah
- d. Optimalisasi kolaborasi antar instansi terkait
- e. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan terhadap rancangan awal RKPD yaitu menganalisa indikator kinerja serta anggaran program dan kegiatan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah Tahun berjalan. Proses tersebut dilakukan untuk memetakan temuan-temuan apa saja yang muncul setelah proses analisis dilaksanakan.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program	85%	8.268.630.246,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program	85%	8.268.630.246,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	-	100.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	-	100.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	2 dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perangkat Daerah	2 dokumen	50.000.000,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	50.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	-	6.102.167.321,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	-	6.102.167.321,00	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	5.523.167.321,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	5.523.167.321,00	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan	44 orang	579.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan	44 orang	579.000.000,00	

			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	-	577.453.504,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	-	577.453.504,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	5 paket	17.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	5 paket	17.000.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	205.453.504,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	205.453.504,00	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	20.000.000,00	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	2 paket	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	2 paket	50.000.000,00	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	100.000.000,00	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	10.000.000,00	
7.	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	-	-	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	-	-	
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	175.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	175.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran		350.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran		350.000.000,00	

1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2 unit	350.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2 unit	350.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu		564.009.421,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu		564.009.421,00	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.833.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.833.000,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	125.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	125.000.000,00	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	435.176.421,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	435.176.421,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	100 %	575.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	100 %	575.000.000,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	200.000.000,00	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	75.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	75.000.000,00	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	300.000.000,00	
Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	-	-	Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan	-	-	

							Adminitrasi Kepegawaian			
1	Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	-	-	Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	-	-	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	15% 100% 15%	15.434.901.075,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	15% 100% 15%	15.434.901.075,00	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	100%	15.434.901.075,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	100%	15.434.901.075,00	
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	100.000.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	100.000.000,00	
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	2 dokumen	597.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	2 dokumen	597.000.000,00	
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22 laporan	1.200.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22 laporan	1.200.000.000,00	
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	1.035.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	1.035.000.000,00	
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	2 laporan	4.880.718.760,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	2 laporan	4.880.718.760,00	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	10 laporan	300.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	10 laporan	300.000.000,00	

7.	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	5 Obyek Pajak	586.550.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	5 Obyek Pajak	586.550.000,00	
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	780.200 dokumen	196.235.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	780.200 dokumen	196.235.000,00	
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50 layanan	274.500.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50 layanan	274.500.000,00	
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	-	-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	-	-	
11.	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	780.200 dokumen	4.684.000.000,00	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	780.200 dokumen	4.684.000.000,00	
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	-	-	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	-	-	
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	100 dokumen	559.711.800,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	100 dokumen	559.711.800,00	
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	4 laporan	649.185.515,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	4 laporan	649.185.515,00	
15.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	372.000.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	372.000.000,00	
	TOTAL				23.703.531.321,00	TOTAL				23.703.531.321,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Badan Pendapatan Daerah. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan digitalisasi pelayanan namun tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang sedangkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 tidak ada. Berikut kami sajikan tabel 2.5 terlampir.

Tabel T-C.2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah suatu proses yang menguraikan prioritas pelaksanaan tugas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kendala yang ada dalam jangka waktu tertentu, sehingga tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif sesuai dengan visi dan rencana yang dibuat. Misi organisasi untuk mencapai visi, harus memenuhi standar penerapan tata kelola yang baik dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pedoman pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menangani Sebagian otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengambilan kebijakan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Blitarm maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” yang muara atau tujuan besarnya adalah “Terwujudnya Kemandirian Fiskal Melalui Penerimaan PAD”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dengan indikator sasaran :

- a. Peningkatan Persentase Pajak terhadap Total Pendapatan
- b. Nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan, dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar maupun kegiatan-kegiatan spesifik sebagai perwujudan Optimalisasi Penerimaan PAD Kabupaten Blitar. Adapun program prioritas untuk pemenuhan kinerja utama Perangkat Daerah adalah Pengelolaan Pendapatan daerah dengan Peningkatan Pajak Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah untuk indikatornya.

Disamping itu ada 12 (dua belas) prioritas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan memberi pengaruh bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

- a. Pemerataan Akses dan Pemenuhan Standar layanan Pendidikan serta pengembangan Pendidikan karakter terintegrasi dengan Pendidikan formal dan nonformal
- b. Memperluas layanan Kesehatan dan kualitas fasilitas Kesehatan yang memiliki standarisasi sertifikasi
- c. Percepatan pengentasan stunting dengan promosi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) berbasis Kesehatan keluarga
- d. Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
- e. Tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- f. Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD
- g. Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan.
- h. Akselerasi pembangunan Kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar.
- i. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana dan prasarana
- j. Tantang penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih
- k. Integrasi treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin

- I. Keberpihakan terhadap keberdayaan perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak, perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam tahun 2025 terdapat 2 Program, 8 Kegiatan, 35 Sub Kegiatan yang meliputi sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
 - a. Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/ Material
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Daya Air dan Listrik' Komunikasi, Sumber

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga;
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penvusunan Kebiasaan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - h. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - k. Penagihan Pajak Daerah
 - l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah m. Pengendalian, Pemeriksaan, Pengawasan Pajak Daerah
 - m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dalam Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021- 2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 **tabel 3.3 terlampir.**

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai Kondisi Rill
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Keuangan				23.703.531.321,00				35.555.296.981,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program		85%	8.268.630.246,00			85%	12.402.945.369,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Bapenda	-	100.000.000,00	APBD KAB		-	150.000.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	Bapenda	2 dokumen	50.000.000,00	APBD KAB		3 dokumen	75.000.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 dokumen	50.000.000,00	APBD KAB		3 dokumen	75.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	Bapenda	-	6.102.167.321,00	APBD KAB		100%	9.153.250.981,50
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 orang	5.523.167.321,00	APBD KAB		44 orang	8.284.750.981,50
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	44 orang	579.000.000,00	APBD KAB		44 orang	868.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Bapenda	-	577.453.504,00	APBD KAB			866.180.256,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bapenda	5 paket	17.000.000,00	APBD KAB		7 jenis	25.500.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	12 paket	205.453.504,00	APBD KAB		12 jenis	308.180.256,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bapenda	2 paket	20.000.000,00	APBD KAB		3 jenis	30.000.000,00

	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	Bapenda	2 paket	50.000.000,00	APBD KAB		3 jenis	75.000.000,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bapenda	5 paket	100.000.000,00	APBD KAB		7 jenis	150.000.000,00
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Umlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bapenda	4 dokumen	10.000.000,00	APBD KAB		6 eks	15.000.000,00
	7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan	Bapenda	-	-	APBD KAB		2 jenis	-
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	8 laporan	175.000.000,00	APBD KAB		12 kali	262.500.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran	Bapenda		350.000.000,00	APBD KAB		100%	525.000.000,00
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Bapenda	2 unit	350.000.000,00	APBD KAB		3 unit	525.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bapenda		564.009.421,00	APBD KAB		100%	846.014.131,50
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12 laporan	3.833.000,00	APBD KAB		12 laporan	5.749.500,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	12 laporan	125.000.000,00	APBD KAB		12 laporan	187.500.000,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Peneyedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Bapenda	12 laporan	435.176.421,00	APBD KAB		12 laporan	652.764.631,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	Bapenda	100 %	575.000.000,00	APBD KAB		100%	862.500.000,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	9 unit	200.000.000,00	APBD KAB		12 unit	300.000.000,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Bapenda	5 unit	75.000.000,00	APBD KAB		7 unit	112.500.000,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bapenda	1 unit	300.000.000,00	APBD KAB		1 unit	450.000.000
	Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	Bapenda	-	-	APBD KAB		100 Persen	-
	1 Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Bapenda	-	-	APBD KAB		44	-

	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah		15% 100% 15%	15.434.901.075,00			15% 100% 15%	23.152.351.612,50
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	100%	15.434.901.075,00	APBD KAB		100%	23.152.351.612,50
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 dokumen	100.000.000,00	APBD KAB		2 dokumen	150.000.000,00
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	Bapenda	2 dokumen	597.000.000,00	APBD KAB		2 dokumen	895.500.000,00
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	22 laporan	1.200.000.000,00	APBD KAB		22 kecamatan	1.800.000.000,00
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 unit	1.035.000.000,00	APBD KAB		3 jenis	1.552.500.000,00
	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Bapenda	2 laporan	4.880.718.760,00	APBD KAB		3 obyek pajak	7.321.078.140,00
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Bapenda	10 laporan	300.000.000,00	APBD KAB		10 jenis	450.000.000,00
	7. Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	Bapenda	5 Objek Pajak	586.550.000,00	APBD KAB		7 objek pajak	879.825.000,00
	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	196.235.000,00	APBD KAB		780.200 SKPD	294.352.500,00
	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	50 layanan	274.500.000,00	APBD KAB		70 kali	411.750.000,00
	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	Bapenda	-	-	APBD KAB		-	-
	11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	4.684.000.000,00	APBD KAB		780.200 dokumen	7.026.000.000,00
	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan pajak Daerah	Bapenda	-	-	APBD KAB		100 berkas	-
	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	Bapenda	100 dokumen	559.711.800,00	APBD KAB		150 dokum	839.567.700,00
	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	4 laporan	649.185.515,00	APBD KAB		4 laporan	973.778.272,50
	15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	4 laporan	372.000.000,00	APBD KAB		4 laporan	558.000.000,00

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai Renstra
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Keuangan				23.703.531.321,00				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program		85%	8.268.630.246,00			85%	102.456.061.717
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Bapenda	-	100.000.000,00	APBD KAB		95	75.000.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	Bapenda	2 dokumen	50,000,000.00	APBD KAB		2 dokumen	37.500.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 dokumen	50,000,000.00	APBD KAB		2 dokumen	37.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	Bapenda	-	6.102.167.321,00	APBD KAB		100%	43.276.662.865,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 orang	5,523,167,321.00	APBD KAB		44 orang	42.113.487.865,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	44 orang	579,000,000.00	APBD KAB		44 orang	1.163.175.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaaksanakan secara akuntable	Bapenda	-	577.453.504,00	APBD KAB		90%	2.696.745.000,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bapenda	5 paket	17.000.000,00	APBD KAB		5 jenis	62.500.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	12 paket	205.453.504,00	APBD KAB		12 jenis	727.500.000,00

	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bapenda	2 paket	20.000.000,00	APBD KAB		2 jenis	135.250.000,00
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	Bapenda	2 paket	50.000.000,00	APBD KAB		2 jenis	87.500.000,00
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggunaan yang disediakan	Bapenda	5 paket	100.000.000,00	APBD KAB		5 jenis	487.500.000,00
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Umlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bapenda	4 dokumen	10.000.000,00	APBD KAB		4 eks	37.500.000,00
	7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan	Bapenda	-	-	APBD KAB		2 jenis	32.500.000,00
	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	8 laporan	175.000.000,00	APBD KAB		12 kali	1.158.995.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran	Bapenda		350.000.000,00	APBD KAB		100%	375.000.000,00
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Bapenda	2 unit	350.000.000,00	APBD KAB		3 unit	375.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bapenda		564.009.421,00	APBD KAB		100%	138.835.000.000,00
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12 laporan	3.833.000,00	APBD KAB		12 laporan	35.000.000,00
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	12 laporan	125.000.000,00	APBD KAB		12 laporan	52.007.350.450,00
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Bapenda	12 laporan	435.176.421,00	APBD KAB		12 laporan	800.000.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	Bapenda	100 %	575.000.000,00	APBD KAB		100%	1.104.000.000,00
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	9 unit	200.000.000,00	APBD KAB		15 unit	504.000.000,00
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Bapenda	5 unit	75.000.000,00	APBD KAB		7 unit	275.000.000,00
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bapenda	1 unit	300.000.000,00	APBD KAB		1 unit	325.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Bapenda	-	-	APBD KAB		100 Persen	440.000.000,00
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Bapenda	-	-	APBD KAB		44	440.000.000,00

	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah		15% 100% 15%	15.434.901.075,00			15% 100% 15%	42.737.000.000,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	100%	15.434.901.075,00	APBD KAB		100%	42.737.000.000,00
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 dokumen	100.000.000,00	APBD KAB		2 dokumen	750.000.000,00
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	Bapenda	2 dokumen	597.000.000,00	APBD KAB		2 dokumen	1.500.000.000,00
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	22 laporan	1.200.000.000,00	APBD KAB		22 kecamatan	6.300.000.000,00
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 unit	1.035.000.000,00	APBD KAB		3 jenis	582.000.000,00
	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Bapenda	2 laporan	4.880.718.760,00	APBD KAB		3 obyek pajak	3.625.000.000,00
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Bapenda	10 laporan	300.000.000,00	APBD KAB		10 jenis	2.850.000.000,00
	7. Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	Bapenda	5 Obyek Pajak	586.550.000,00	APBD KAB		7 obyek pajak	1.250.000.000,00
	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	196.235.000,00	APBD KAB		780.200 SKPD	3.125.000.000,00
	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	50 layanan	274.500.000,00	APBD KAB		70 kali	375.000.000,00
	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	Bapenda	-	-	APBD KAB		100	375.000.000,00
	11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	4.684.000.000,00	APBD KAB		780.200 dokumen	18.455.000.000,00
	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan pajak Daerah	Bapenda	-	-	APBD KAB		100 berkas	375.000.000,00
	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	Bapenda	100 dokumen	559.711.800,00	APBD KAB		150 rekom	625.000.000,00
	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	4 laporan	649.185.515,00	APBD KAB		4 laporan	2.925.000.000,00
	15. Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	4 laporan	372.000.000,00	APBD KAB		4 laporan	558.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, serta memperoleh alokasi anggaran yang diperlukan. Program atau kegiatan Perangkat Daerah (PD) terdiri dari serangkaian rencana kerja yang dirancang untuk memenuhi prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Perumusan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta kebutuhan dan kemampuan daerah, guna mencegah isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Rencana kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan alokasi anggaran yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal.

Dalam menjalankan program dan kegiatan sangat diperlukan sebuah tujuan sebagai pedoman, sedangkan tujuan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, yaitu :

“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah“

Adapun anggaran yang dibutuhkan berdasarkan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun anggaran 2024 untuk mendukung program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp23.703.531.321,00** (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan pendapatan Daerah kabupaten Blitar Tahun 2025 dan Prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 terlampir pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 bertujuan menetapkan panduan dan arah pembangunan di bidang pendapatan Kabupaten Blitar, sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Proses penyusunan Rencana Kerja ini melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga semua pihak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merasa diapresiasi, terwakili, dan ikut bertanggung jawab atas program kerja yang direncanakan. Beberapa poin penting terkait optimalisasi penerimaan pendapatan meliputi:

1. Meningkatkan efisiensi pelayanan dengan dukungan aplikasi dan tenaga pelaksana yang kompeten.
2. Melaksanakan rekonsiliasi pajak secara rutin untuk mengurangi piutang pajak.
3. Melaksanakan *Role Sharing* dan *Cost Sharing* yang melibatkan Bapenda Provinsi sesuai SE Gubernur Jawa Timur Nomor: 900.1.13/26405/202/2024 Tentang Pelaksanaan Sinergi Pendanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak.
4. Memperbaiki basis data pajak yang lebih akurat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui edukasi, sosialisasi, dan konsultasi.

Optimalisasi pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mencakup:

1. Mengembangkan teknologi digitalisasi untuk mendukung penerimaan daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Menciptakan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait melalui sinergi program dan kegiatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan piutang yang terus bertambah setiap tahun.
4. Melibatkan pihak ketiga dan aparatur wilayah untuk menyelesaikan masalah basis data pajak yang belum akurat dan valid.

Semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat tercapai. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Blitar, Agustus 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI L.,ST,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19780426 200212 2 011